PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, Program-program dan Kegiatan Indikatif Inspektorat selama kurun waktu Satu Tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat .

Akhirnya untuk melengkapi kekurangan Rencana Kerja (RENJA) ini, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyempurnaan Renja ini.

Belopa, Juli 2022

INSPEKTUR,

ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar belakang 2

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 & Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat 22

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 25

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 30

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 30

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 31

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 38

BAB V Penutup 49

4.1 Kaidah Pelaksanaan

4.2 Rencana Tindaklanjut

DAFTAR TABEL

Tabel I. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d 2021 (Tahun Berjalan) Kabupaten Luwu 10

Tabel 2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 15

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kebupaten Luwu 24

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 33

Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 38

BAB I
PENDAHULUAN

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan yaitu untuk tahun 2023. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut, maka dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi inspektorat.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di lingkungan departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7326/SJ Tahun 2019 tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabuapten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 125 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu;
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Luwu Nomor 122 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, jabatan dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu;
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Luwu.
29. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kabupaten Luwu No 77 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu serta tolak ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi kerangka dasar Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2023 dapat tercapai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 diuraikan secara singkat dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II :Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III:Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV :Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat

Bab V :Penutup

- 4.1 Kaidah Pelaksanaan
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) Inspektorat Daerah Tahun 2021. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat di-tujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator - indikator sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Target Kinerja capaian Program Renja Tahun 2021 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2019-2024. yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan mandatori Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 akan muncul penambahan kegiatan dan juga indikator kinerja tahun 2023.

Alokasi anggaran program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.347.410.490 telah terealisasi sebesar Rp. 1.953.161.209 atau 83,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 1.880.945.900 dan realisasi anggaran Rp.1.771.375.170 atau 94,17%, meliputi :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 850.662.050 terealisasi sebesar Rp. 814.358.3093 atau 95,73%. Pada tahun 2021 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal dan Monitoring, Evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP.
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran Rp. 1.030.283.850 terealisasi sebesar Rp.957.016.777 atau 92,89%. Pada tahun 2021 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 466.464.590 dan realisasi anggaran Rp. 181.786.039 atau 38,97 %, meliputi:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran Rp. 7.834.600 terealisasi sebesar Rp. 5.330.000 atau 68.03 %. Pada tahun 2021 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan.
b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp. 458.629.990 terealisasi sebesar Rp. 176.456.039 atau 38.47 %. Pada tahun 2021 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendampingan dan Asistensi

Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

.Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2022 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2021 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2022 sudah dapat dikaitkan dengan pencapaian target tahunan dalam rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2022 masih dalam tahun berjalan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. **Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:**
   - ❖ Program Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan dalam hal ini terdapat pada :
     1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
     2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

b. **Program/ kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :**
   - ❖ Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam hal ini terdapat pada Kegiatan :
     1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
     2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c. **Penyebap tidak tercapaianya,terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :**
   Ketersediaan Instrumen yang fungsinya membantu aparatur dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi masih kurang.

d. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Inspektorat adalah** :
   Terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah**	**%**	**100,00**	**31.361.616.573**	**100**	**5,615,565,971**	**100.00**	**5,360,079,209**	**100.00**	**95.45**	**Inspektorat**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu**	**%**	***100,00***	***276.974.780***	100	36,638,840	100.00	35,309,600	100.00	96.37	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Dokumen	9	119.311.350	2	15,329,200	2.00	14,406,600	100.00	93.98	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	44.988.810	1	5,866,400	1.00	5,838,000	100.00	99.52	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	28.471.830	1	3,800,920	1.00	3,460,500	100.00	91.04	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	28.928.530	1	3,791,400	1.00	3,763,000	100.00	99.25	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	27.302.830	1	5,800,920	1.00	5,791,500	100.00	99.84	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20	27.971.430	4	2,050,000	2.00	2,050,000	50.00	100.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daera	**Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu**	**%**	***100,00***	***22.500.028.508***	**100**	**4,093,674,702**	**100.00**	**4,081,002,604**	**100.00**	**99.69**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.436	21.741.068.068	43	4,073,631,702	43.00	4,077,082,604	100.00	100.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4	30.335.840	1	4,009,000	-	-	0.00	0.00	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	8	27.354.600	2	16,034,000	2.00	3,920,000	100.00	24.45	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase ASN dengan predikat kinerja baik**	**%**	***100,00***	***2.185.867.400***	**100**	**224,311,500**	**75.00**	**201,547,800**	**75.00**	**89.85**	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	152	1.585.955.000	43	224,311,500	13.00	201,547,800	30.23	89.85	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah**	**%**	***100,00***	***2.114.198.825***	**100**	**461,675,810**	**100.00**	**435,373,137**	**100.00**	**94.30**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	415	43.551.400	9	9,864,100	9.00	9,722,761	100.00	98.57	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	38	189.175.625	41	100,907,410	36.00	99,505,365	87.80	98.61	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	Jenis	2.072	109.037.400	20	24,893,100	20.00	24,285,402	100.00	97.56	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	55.453.000	3	12,583,000	2.00	11,461,387	66.67	91.09	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Bulan	48	200.000.000	500	50,000,000	500.00	39,915,000	100.00	79.83	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Bulan	48	216.594.900	35	62,238,900	35.00	54,786,409	100.00	88.03	
		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	OK	6.348	221.660.000	3	55,415,000	3.00	54,524,003	100.00	98.39	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	OK	344	999.751.500	43	145,774,300	34.00	141,172,810	79.07	96.84	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik**	%	***85,09***	***1.136.347.441***	**52.90**	-	-	-	0.00	0.00	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Beubeleur yang diadakan	Unit	37	197.460.000	1	-	-	-	0.00	0.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	***100,00***	***2.165.038.140***	**100**	**630,529,260**	**100.00**	**469,950,952**	**100.00**	**74.53**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Bulan	48	770.788.140	12	181,919,260	12.00	79,940,952	100.00	43.94	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	1416	1.394.250.000	35	448,610,000	35.00	390,010,000	100.00	86.94	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	***100,00***	***932.256.213***	**100**	**168,735,859**	**75.00**	**136,895,116**	**75.00**	**81.13**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	188	624.436.625	47	102,234,125	47.00	81,913,134	100.00	80.12	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	Unit/Set	212	82.530.000	53	16,255,000	42.00	16,110,259	79.25	99.11	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	M2	1.200	225.289.588	300	50,246,734	2.00	38,871,723	0.67	77.36	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**76.37**	**77.20**	
										Predikat kinerja			
2.	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	%	**90,00**	**12.351.683.200**	**90**	**1,880,945,900**	**85.00**	**1,822,998,914**	**94.44**	**96.92**	
			Persentase Tindaklanjut Temuan BPK	%	**85,00**		**85**						
			Persentase Tindaklanjut Temuan BPKP	%	**90,00**		**90**						
			Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Provinsi	%	**90,00**		**90**						
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	**100,00**		**100**						
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal**	**Laporan**	***300***	***7.986.827.600***	**75**	**850,662,050**	**90.00**	**827,190,093**	**100.00**	**97.24**	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	LHP	122	3.274.655.600	32	411,306,400	32.00	410,520,368	100.00	99.81	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	LHP	76	605.700.000	16	89,700,000	12.00	89,275,000	75.00	99.53	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang direviu	Laporan	20	602.000.000	5	86,000,000	5.00	81,450,000	100.00	94.71	
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu	Laporan	12	1.049.200.000	3	17,200,000	1.00	17,200,000	33.33	100.00	
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan desa	Laporan	72	1.358.752.800	18	124,288,200	8.00	124,183,432	44.44	99.92	
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	Laporan	12	297.782.800	3	34,400,000	2.00	34,400,000	66.67	100.00	
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	Temuan	80	798.736.400	20	87,767,450	20.00	70,161,293	100.00	79.94	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tertentu**	**Laporan**	***228***	***4.364.855.600***	**57**	**1,030,283,850**	**90.00**	**995,808,821**	**100**	**96.65**	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian negara	Orang	80	1.493.607.400	20	373,401,850	20.00	349,492,700	100.00	93.60	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	148	2.871.248.200	37	656,882,000	36.00	646,316,121	97.30	98.39	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**90.42**	**96.34**	
										Predikat kinerja			
3.	**Meningkatnya Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi**	**%**	**100,00**	**3.833.234.360**	**100**	**466,464,590**	**60.00**	**312,412,820**	**60.00**	**66.97**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah Kebijakan teknis dibidang pengawasan yang dirumuskan**	**Kebijakan**	***8***	***153.357.000***	**2**	**7,834,600**	**75.00**	**5,330,000**	**75.00**	**68.03**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan teknis di bidang Pengawasan yang dirumuskan	Dokumen	24	78.557.000	6	7,834,600	1.00	5,330,000	16.67	68.03	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6x100		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendampingan dan Asistensi	**Peraentase Objek Pembinaan yang dilakukan Pendampingan dan asistensi**	**%**	***20,00***	***3.679.877.360***	**20.00**	**458,629,990**	**85.00**	**307,082,820**	**100,00**	**66.96**	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Laporan	20	339.054.000	5	44,137,000	5.00	33,664,600	100.00	76.27	
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Laporan	4	264.559.160	1	46,652,290	1.00	43,921,000	100.00	94.15	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	PD	140	1.283.893.000	1	257,578,600	1.00	192,368,302	100.00	74.68	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asisten dan verifikasi penegakan integritas	Laporan	4	1.792.371.200	1	110,262,100	1.00	37,128,918	100.00	33.67	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**68.83**	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM							7,962,976,461		7,495,490,943	94.13		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai dengan Dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan Renstra tertuang dalam capaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	
2	Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	73,33	82,22	91,11	64,44	64,44	82,22	91,11	
3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
4	Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
5	Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
6	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	4	8	12	16	4	4	12	16	
7	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	2	4	7	9	2	2	7	9	
8	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	95,45%	100%	100%	100%	
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	85%	85%	85%	85%	82,30%	85%	85%	85%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, Yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Adanya dokumen Renstra Inspektorat Daerah yang disusun dengan baik dan selaras dengan pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD.
- Tingkat pendidikan sebagian besar PNS dilingkungan Inspektorat Daerah yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan kompetensinya.
- Adanya standar baku mutu atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

Rumusan penjelasan visi, rumusan misi, dan program kerja tersebut di atas merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah

b. Faktor Penghambat :

- Kesadaran aparatur sebagai agen perubahan masih rendah sehingga cenderung pragmatis, kurang disiplin dan lambat dalam transformasi menuju aparatur yang profesional, inovatif dan rensponsif.
- Untuk membentuk kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, dibutuhkan komitmen dan investasi yang berkelanjutan. Khusus untuk Inspektorat Daerah, anggaran yang disediakan selama ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sulit menjadi perangkat daerah yang dapat dijadikan contoh dalam kapasitas dan profesionalisme aparatur.

- Aparatur yang memiliki kompetensi masih kurang, khususnya dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini menyebabkan aparatur Inspektorat Daerah, khususnya P2UPD kurang mampu melihat hubungan antara output, benefit, hasil dan dampak dari suatu kegiatan terhadap sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga rekomendasi yang disampaikan tidak menjadikan aparatur perangkat daerah yang diperiksa dan diawasi menjadi lebih baik dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan.
- Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang merupakan tugas pokok Inspektorat Daerah sulit ditingkatkan tanpa ketersediaan aparatur sesuai standar dan anggaran sesuai kebutuhan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Kapasitas Kelembagaan Masih Lemah

Kapasitas kelembagaan dimaknai sebagai volume/kekuatan perangkat daerah dari aspek jumlah pegawai, jumlah anggaran, maupun ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).
b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan.
c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang refresentatif.
d. Anggaran Inspektorat Daerah belum mencapai 0,75% dari total belanja daerah atau masih kurang dari 10 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD.

2. Kapabilitas Kelembagaan Belum Optimal

Kapabilitas kelembagaan dimaknai sebagai kemampuan perangkat daerah menggerakkan organisasi dari aspek profesionalisme/kompetensi aparatur, kebijakan/sistem yang diterapkan, maupun ketersediaan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas, berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan berupa seperangkat sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan.
b. Masih kurangnya jatah diklat kompetensi khusus dari instansi pembina (BPKP untuk Auditor dan Kemendagri untuk P2UPD).
c. Masih ada instrumen/SOP pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum tersedia, misalnya petunjuk teknis dalam melakukan reviu rencana perangkat daerah

maupun implementasi SAKIP perangkat daerah.

d. Masih belum memadainya sarana mobilitas maupun pendukung pelaksanaan pengawasan lainnya, seperti kendaraan operasional dan peralatan ukur/uji tertentu.

3. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Belum Efektif

Pengawasan yang efektif seharusnya memberikan perubahan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain meningkatnya tata kelola, kompetensi aparatur maupun paradigma terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi kepada hasil yang dicapai. Namun pada kenyataannya, berbagai kondisi yang terkait dengan hal tersebut di atas, belum terlihat perubahan sebagaimana yang diharapkan, perangkat daerah cenderung enggan atau lambat bertransformasi menuju birokrasi yang profesional, akuntabel dan inovatif. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi pembinaan pada tahap perencanaan belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan rencana perangkat daerah belum selaras dengan rencana pembangunan daerah, belum menggambarkan potensi dan permasalahan yang ada, kurang terukur dan berkelanjutan dalam pencapaian target pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, proses yang belum optimal tersebut menyebabkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum dapat dilakukan secara optimal dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Selanjutnya, kondisi ini mempersulit pelaksanaan fungsi pengawasan mengingat arsitektur kinerja maupun tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlihat dalam dokumen dan kurang dimengerti oleh aparatur pengawas.

b. Inspektorat Daerah belum maksimal dalam memanfaatkan seluruh potensi untuk melakukan pengawasan. Kekurangan personil untuk melakukan fungsi pengawasan seharusnya dapat diminimalkan dengan melibatkan seluruh aparatur yang ada dalam pengawasan. Selama ini yang berperan dalam pengawasan adalah auditor dan P2UPD, sedangkan aparatur lainnya belum dilibatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan

secukupnya agar seluruh aparatur yang ada dapat terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan.

c. Penerapan metode *Current Issue, Check and Balances* dan *Clearing House* masih kurang dan belum berkesinambungan. Disamping mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dapat dilakukan, yaitu proaktif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat (current issue), menguji kebenaran terhadap isu yang berkembang (check and balances), dan menjembatani persoalan yang dihadapi perangkat daerah dengan BPK/BPKP/Inspektorat Daerah Provinsi maupun masyarakat.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada melalui kerjasaman dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
   a. Peningkatan Kapabilitas APIP.
   b. Peningkatan Maturitas SPIP.
   c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis
   d. Perumusan regulasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
   e. Meningkatkan system teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pengawasan internal.
4. Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan daftar materi pengawasan (DMP)
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Mengusulakan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Bupati Luwu serta visi dan misi Inspektorat khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2023 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2023 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Luwu.

Berikut ini adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023:

Tabel T-C. 3.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Luwu
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten**		**90 %**	**2.757.934.450**	**90%**	**3.439.049.200**
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK		**85 %**		**85 %**	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP		**90 %**		**90 %**	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi		**90 %**		**90 %**	
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti		**100 %**		**100 %**	
2.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	***Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal***	**Belopa**	***75 Laporan***	***1.518.914.800***	***75 Laporan***	***2.191.414.500***
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belopa	30 LHP	690.479.400	30 LHP	933.963.900
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Belopa	20 Laporan	234.070.200	20 Laporan	234.070.200
	3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang direviu	Belopa	5 Laporan	71.330.200	5 Laporan	172.000.000
	4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	Belopa	3 Laporan	21.590.200	3 Laporan	344.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	5. *Pengawasan Desa*	*Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Desa*	Belopa	*18 Laporan*	*205.671.550*	*18 Laporan*	*205.671.550*
	6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Pengawasan	Belopa	3 Laporan	81.410.100	3 Laporan	87.345.700
	7. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	Belopa	20 Temuan	214.363.150	20 Temuan	214.363.150
2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	***Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tertentu***	**Belopa**	***57 Laporan***	***1.239.019.650***	***57 Laporan***	***1.247.634.700***
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian daerah	Belopa	20 Orang	364.786.800	20 Orang	373.401.850
	2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Belopa	37 Laporan	874.232.850	37 Laporan	874.232.850
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Capaian Target Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Belopa**	**100 %**	**621.344.390**	**100 %**	**670.597.040**
03.01	. **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan**	**Belopa**	**2 Kebijakan**	***9.798.900***	**2 Kebijakan**	***19.597.800***
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Belopa	6 Dokumen	9.798.900	6 Dokumen	19.597.800
03.02	***Pendampingan dan Asistensi***	**Persentase Objek Pembinaan yang**		**20 %**	***611.545.490***	**20 %**	***650.999.240***

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		dilakukan Pendampingan dan Asistensi	**Belopa**				
	1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Belopa	5 Laporan	135.902.300	5 Laporan	135.902.300
	2. Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Belopa	1 Laporan	66.137.090	1 Laporan	66.137.090
	3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	Belopa	35 PD	370.052.350	35 PD	370.052.350
	4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Belopa	1 Laporan	39.453.750	1 Laporan	78.907.500

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan kepemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap harus mengawal proses perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan dengan agenda menyerap aspirasi Masyarakat, sekalipun tidak ada usulan ataupun permintaan sehingga penyusunan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Luwu tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Luwu belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders sehingga penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
   a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
   b. Review Rencana Kerja Anggaran;
   c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   d. Review Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah;
   e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
   f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
   g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
   h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
   i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
   j. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan
   k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :

a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :

1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
3) Pembangunan zona integritas;
4) Pengendalian gratifikasi;
5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
6) Penanganan pengaduan masyarakat;
7) Penguatan Whistle Blowing System;
8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP);
    a. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
    b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
    a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
    b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
    c. Koordinasi program pengawasan;
    d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut,seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2019 – 2024. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel.3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	Mewujudkan pemerintahan yang profesionalisme, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel	Mewujudkan pengawasan intern pemerintah yang profesional dan independen		Persentase temuan hasil pengawasan APFP dan laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	B	B	BB	BB	BB	BB
				Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	64,44	64,44	73,33	82,22	91,11	91,11
				Level kapabilitas APIP	Level 2	Level 2,72	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

No	MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	BB	BB
			Meningkatnya kualitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	0	0	4	8	12	16	0
				Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik	1	1	2	4	7	9	9

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk mengetahui keterkaitan antar komponen rencana pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2023 menetapkan 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dan 43 sub. kegiatan sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. **Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

c. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
   - *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*

d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerang Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang- Undangan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3.Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upayah mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Inspektorat Kabupaten Luwu dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun 2023 anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan. Pagu indikatif Perangkat Daerah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan RPJMD/Renstra/Renja Perangkat Daerah *(Top Down Planning)* yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**10,298,717,634**					**12,157,986,793**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,919,438,794**					**8,048,340,553**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**106,644,800**					**108,909,360**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen Renja serta perubahan Renja yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	2 Dokumen	100 %	52,399,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	52,399,600
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Dokumen	100 %	10,568,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	12,832,710
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Dokumen	100 %	10,194,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	10,194,450
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Dokumen	100 %	9,186,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	9,186,350
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Dokumen	100 %	7,952,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	7,952,800
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persentase jumlah dokumen perencaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	5 Dokumen	100 %	16,343,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	16,343,450

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,719,758,011**					**5,333,604,224**
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	45 Orang /bulan	100 %	4,473,361,211	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	5,085,360,014
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	113 Orang/ Bulan	100 %	229,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	229,260,000
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Laporan	100 %	7,117,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	8,965,210
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase dokumen administrasi keuangan	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	2 Laporan	100 %	10,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	10,019,000
6 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**11,426,600**					**12,833,206**
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	4 Laporan	100 %	11,426,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	12,833,206
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**455,515,000**					**532,568,000**
6 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase jumlah ASN dengan kinerja baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	105 Stell/ Pasang	100 %	81,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	39,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase jumlah ASN dengan kinerja baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	45 Orang	100 %	373,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	493,568,000
6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									**662,640,220**					**851,046,600**
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	9 Jenis	100 %	10,889,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	11,502,100
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	22 Jenis	100 %	252,853,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	252,853,800
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	20 Jenis	100 %	12,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	28,048,100
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	5,133,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	26,325,000
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	16,744,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	14,290,000
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	47,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	60,187,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	57,127,600
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kunjungan tamu yang difasilitasi	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	100 Oang/ Kegiatan	100 %	47,258,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	55,415,000
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	43 Orang/Ke	100 %	210,088,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	355,485,000
6 01 01 2.07 Pen	**adaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**323,700,000**					**557,940,000**
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	5 Unit	64.15 %	171,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	525,690,000
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	10 Unit	64.15 %	152,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	32,250,000
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**444,110,400**					**444,110,400**
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Persentase ketersediaan jasa penunjang	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	12 Bulan	100 %	117,710,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	117,710,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan jasa penunjang	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	23 Orang/Bulan	100 %	326,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	326,400,000
6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**195,643,763**					**207,328,763**
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	47 Unit	100 %	82,926,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	82,926,875
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	53 Unit	100 %	12,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	24,385,000
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Unit	100 %	100,016,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	100,016,888
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**2,757,934,450**					**3,439,049,200**
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**1,518,914,800**					**2,191,414,500**
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	30 LHP	75 Laporan	690,479,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	933,963,900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	20 LHP	75 Laporan	234,070,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	234,070,200
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	5 Laporan	75 Laporan	71,330,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	172,000,000
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	3 Laporan	75 Laporan	21,590,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu	100 %	344,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
		Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi				85 % 90 % 90 % 90 %						Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	85 % 90 % 90 % 90 %	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	18 Laporan	75 Laporan	205,671,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	205,671,550

6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	3 Laporan	75 Laporan	81,410,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	100 % 85 % 90 % 90 %	87,345,700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 %	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	20 Temuan	75 Laporan	214,363,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	214,363,150
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**1,239,019,650**					**1,247,634,700**
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian negara	Jumlah laporan hasil pengawasan tertentu	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	20 Orang	57 Laporan	364,786,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	100 % 85 % 90 % 90 % 90 %	373,401,850
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan	Jumlah laporan hasil pengawasan tertentu	Kab. Luwu, Belopa,	100 % 85 %	37 Laporan	57 Laporan	874,232,850	Dana Transfer		Persentase pengaduan	100 % 85 %	874,232,850

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	tujuan tertentu		Tampumia Radda	90 % 90 % 90 %				Umum-Dana Alokasi Umum		masyarakat yang ditindaklanjtu Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan BPKP Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	90 % 90 % 90 %	
6 01 03 PRO	**RAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**621,344,390**					**670,597,040**
6 01 03 2.01 Peru	**musan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**9,798,900**					**19,597,800**
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan yang dirumuskan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	6 Dokumen 0 Rekomendasi	2 Kebijakan	9,798,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	19,597,800
6 01 03 2.02 Pen	**ampingan dan Asistensi**								**611,545,490**					**650,999,240**
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase objek pembinaan pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	5 Laporan 0 perangkat daerah	20 %	135,902,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	135,902,300
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan,asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi B Jumlah Perangkat Daerah Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase objek pembinaan yang	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Laporan 0 perangkat daerah	20 %	66,137,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	66,137,090
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan,	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Persentase objek pembinaan pendampingan dan	irokrasi pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia	100 %	35 PD	20 %	370,052,350	Dana Transfer Umum-		Tingkat capaian target pelaksanaan	100 %	370,052,350

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Korupsi	pendampingan dan asistensi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	asistensi	Radda					Dana Alokasi Umum		perumusan kebijakan, pendampinga n dan		
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan,asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Persentase objek pembinaan pendampingan dan asistensi	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	100 %	1 Laporan	20 %	39,453,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	78,907,500
								TOTAL	10,298,717,63					12,157,986,793

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2023 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kwalitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga singkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

V.1. Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk memenuhi unsur-unsur diatas sehingga memenuhi kaidah aturan perundangan, prosedur perencanaan dan keinginan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai elemen pengawasan Pemerintahan dapat dirasakan manfaat dan hasilnya.

V.2. Rencana Tindak Lanjut.

a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan objek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
b. Melakukan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindaklanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen resiko terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.
c. Melakukan asistensi dan pembinaan terhadap 35 perangkat daerah.
d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
e. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam rangka Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI)
f. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2023 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2023.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Belopa, Juli 2022
INSPEKTUR,

ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121002